

ISSN 1979-8911

ISTEK

Jurnal Kajian Islam Sains dan Teknologi

Volume II. No. 3-4
Edisi Desember 2008



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Abdul Kodir
Kedudukan dan Peran Manusia dalam Al-Qur'an
A. Darun Setiady
- Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Modern
(Kajian Tentang Perkembangan Paradigma)
Nanih Machendrawaty
- Stagnasi Dunia Islam dan Kebangkitan Islam dalam Abad Ke 21
Tety Sudiarti
- Corrosion of Carbon Steel in Hard Water Medium
Lilik Hasanah¹⁾, Sukirno²⁾ dan Khairurrijal²⁾
- Pengaruh Regangan Si/Si_{1-x}Ge_x terhadap Arus Terobosan pada Transistor
Dwikutub Sambungan Hetero Si(110)/Si_{0.5}Ge_{0.5}/Si(110) Anisotropik
Mohamad Agus Salim
- Isolasi, Identifikasi dan Monokultur Mikroalga Lokal yang Berpotensi
Menghasilkan Biodiesel
Iman Hernaman^{1,2)}, Kurnia A. Kamil¹⁾ dan Novi Mayasari¹⁾, M. Agus Salim²⁾
- Dampak Nata De Coco dalam Ransum Mencit (*Mus Musculus*) terhadap
Metabolisme Lemak dan Penyerapan Mineral
M. Subandi
- Oxygen (*Naarun*) And Chlorophyll (*Syajaru Al-Akhdlar*)
Form of Food and Energy for Life
Gede H. Cahyana
- Inovasi Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Teknologi Tepat Guna untuk
Pesantren
Dodo Arsyad
- Peranan Budidaya Padi Organik dalam Meningkatkan Peluang
Kerja di Pedesaan
Yani Suryani
- Mikroba Pathogen dan Pencemaran Makanan
Terry Sriwana
- Tri Logi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Lingkungan Hidup
A. Rusdiana
- Manajemen Pembangunan Berwawasan Lingkungan: Alternatif
Pemberdayaan Masyarakat
Mohamad Irfan
- Perancangan Sistem Informasi Akademik dengan Mengimplementasikan ERP
Opik Taupik K.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam Pendidikan Agama Islam
Aep Saepuloh
- Urgensi Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bagi Mahasiswa Sains & Teknologi

Jurnal ISTEK	Volume II	No. 3-4	Desember 2008
--------------	-----------	---------	---------------

1. **Kedudukan dan Peran Manusia dalam Al-Qur'an**
Abdul Kodir..... 201-218
2. **Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Modern**
A. Darun Setiady 219-236
3. **Stagnasi Dunia Islam dan Kebangkitan Islam dalam Abad Ke 21**
Nanih Machendrawaty 237-254
4. **Corrosion of Carbon Steel in Hard Water Medium**
Tety Sudiarti 255-262
5. **Pengaruh Regangan $Si/Si_{1-x}Ge_x$ terhadap Arus Terobosan pada Transistor Dwikutub Sambungan Hetero $Si(110)/Si_{0.5}Ge_{0.5}/Si(110)$ Anisotropik**
Lilik Hasanah dkk. 263-275
6. **Isolasi, Identifikasi dan Monokultur Mikroalga Lokal yang Berpotensi Menghasilkan Biodisel**
Mohamad Agus Salim 277-283
7. **Dampak Nata De Coco dalam Ransum Mencit (*Mus Musculus*) terhadap Metabolisme Lemak dan Penyerapan Mineral**
Iman Hernaman, dkk. 285-292
8. **Oxygen (*Naarun*) and Chlorophyll (*Syajaru Al-Akhdlar*) Form Food and Energy for Life**
M. Subandi 293-300
9. **Inovasi Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Teknologi Tepat Guna untuk Pesantren**
Gede H. Cahyana 301-310
10. **Peranan Budidaya Padi Organik dalam Meningkatkan Peluang Kerja di Pedesaan**
Dodo Arsyad 311-325
11. **Mikroba Pathogen dan Pencemaran Makanan**
Yani Suryani 327-338
12. **Tri Logi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Lingkungan Hidup**
Terry Sriwana 339-356
13. **Manajemen Pembangunan Berwawasan Lingkungan**
A. Rusdiana 357-376
14. **Perancangan Sistem Informasi Akademik dengan Mengimplementasikan ERP**
Mohamad Irfan 377-382
15. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam PAI**
Opik Taupik K. 383-390
16. **Urgensi ISD dan IBD bagi Mahasiswa Sains & Teknologi**
Aep Saepuloh 391-400

MANAJEMEN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN: ALTERNATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rusdiana

Abstract

Development is required to solve many issues, one of them is to solve population and environment issues, but the experience shows that the development has caused many negative impacts to the ecosystem, especially in the big cities there are air pollutions which caused by the increasing of the numbers of vehicles in the big cities such as Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, and Medan. World Bank expected only for Jakarta that the air pollution has impacted the damages to the health that certainly costs a lot of money. In 1990 it was expected US \$ 97 millions – US \$ 425 millions. Thus, the air pollution is also caused by industry's wastes that occurred frequently in every district in Indonesia

Society development emphasizes the principal of autonomous (people participate actively since determining the problem until the efforts to solve it) The used method is "doing with the community" not "doing for the community". By this method the society become active and dynamist, they are able to identify the problems and their needs and determine the solution by digging living source that consists in their own environment.

Society utilization aimed to improve society potential in order to be able to increase the better quality of life for whole society through self-supporting activities. To reach this purpose, the factor of human resource development through formal and informal education should be the priority. Utilizing the society is aimed to "educating the society in order that they can educate themselves" or "helping the society in order that they can help themselves". The reached purpose through the effort of society utilization is autonomous society, self-supporting, enable to adopt any innovation, and possess the cosmopolitan thought pattern.

Keyword: autonomousness, utilization, ecosystem management

PENDAHULUAN

Istilah pembangunan membawa konotasi "perubahan yang direncanakan; dilaksanakan oleh suatu negara; untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Definisi tersebut masih bersifat umum jadi sulit untuk digunakan sebagai alat analisis.

Diasumsikan bahwa strategi utama pembangunan suatu negara ialah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti

pembangunan meningkatkan kemampuan produktif suatu masyarakat, mengembangkan suatu cara produksi yang baru dan lebih baik yang memungkinkan terbentuknya kekayaan yang lebih besar. Diharapkan kekayaan semakin besar dan akan menetes ke bawah "trickle down".

Pembangunan seharusnya tidak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga kondisi sosial dan politik. Dengan demikian perlu dibedakan antara

pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan menunjukkan pandangan yang bersifat kuantitatif; hanya menyangkut proses ekonomi saja. Pembangunan menunjukkan pandangan yang bersifat kualitatif; berkaitan dengan aspek ekonomi dan non ekonomi.

Pembangunan dalam arti luas adalah segala usaha mencapai kebutuhan pokok, pembasmian kemiskinan dan penciptaan taraf kehidupan yang lebih baik; jadi pembangunan tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi saja, tetapi juga sosial politik dan budaya. Negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi belum tentu telah berhasil dalam pembangunan dalam arti luas.

Studi Pembangunan merupakan bidang studi yang tumbuh dari perhatian besar pada perkembangan Negara-negara Dunia Ketiga dan keinginan untuk memperbaiki Negara-negara yang baru merdeka terutama setelah PD II. Studi Pembangunan merupakan bagian dari Ilmu Sosial; terdiri atas berbagai disiplin ilmu yang berbeda; focus perhatiannya pada masalah perubahan social di Negara Dunia Ketiga; sebagai usaha untuk menjelaskan situasi Negara tersebut yang biasa digolongkan sebagai tradisional. Perspektif terhadap berbagai gejala social ini berbeda-beda.

KONSEP, TEORI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Arif Budiman (1995 :x) membagi teori pembangunan ke dalam

tiga katagori besar, yaitu: Pertama, teori modernisasi yang menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Kedua, kelompok teori ketergantungan merupakan reaksi terhadap teori modernisasi. Ketiga, teori yang merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, Teori-teori ini belum memiliki nama sendiri sebagai satu kelompok, karena itu sering disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Di dalamnya terdapat teori sistem dunia, teori artikulasi, dan sebagainya.

Secara teoritis, diskursus pembangunan acapkali dilandasi oleh perspektif yang berbeda dan menimbulkan perdebatan sengit. Perdebatan ini merupakan hal yang wajar karena bermula dari paradigma yang berbeda berupa ruang waktu sekaligus kepentingan yang berbeda pula. Meskipun paradigma teori yang berbeda dalam menjelaskan pembangunan, akan tetapi tidak mempengaruhi terhadap anggapan bahwa kerja pembangunan adalah kerja tentang perubahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan dihadapkan pada perubahan dari kondisi tertentu ke kondisi lain. Dalam bahasa lain, pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat industri modern. Oleh karena itu pembangunan acap diberi pengertian sebagai proses perubahan tatanan hidup yang direncanakan. Pembangunan dipahami sebagai konsep yang tersusun dan terencana

secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana sistem baru. Dalam hal ini, Emmanuel Subangun mendefinisikan dan menginterpretasikan pembangunan sebagai proses perubahan yang bisa menjamin adanya konsolidasi sistem dan merubah peluang baru. Dalam artian seperti ini pembangunan memerlukan tafsiran sebagai langkah bagi tata pergaulan secara terus menerus yang melingkupi sebuah segi sistem pergaulan.

Wacana pembangunan menimbulkan harapan-harapan bagi bangsa yang dilanda kemandegan struktur dan kultur. Dengan pembangunan diharapkan kondisi seluruh aspek kehidupan dapat ditata dengan baik menuju kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Disamping dapat merubah kondisi fisik dan struktur, pembangunan diharapkan mampu mengembangkan tata nilai kultur, seperti keadilan, pemerataan, dan kemakmuran.

Manusia merupakan sasaran utama bagi proses pembangunan. Keberadaannya sebagai subjek dan objek pembangunan diharapkan mampu memerankan dirinya sebagai agen perubahan bagi tatanan sosial kehidupan. Arif Budiman menjelaskan bahwa pembangunan pada akhirnya akan ditujukan pada manusianya. Manusia yang dibangun adalah manusia kreatif. Untuk bisa kreatif mereka harus merasa bahagia, aman, bebas dari rasa takut. Karenanya mesti diciptakan lingkungan politik dan

budaya yang kondusif, sehat, dan dinamis.

Banyak pemikir tentang pembangunan membagi ke dalam beberapa model pembangunan, diantaranya adalah Berger membagi model pembangunan menjadi dua model yang saling bertolak belakang, yaitu pembagian yang bercirikan kapitalistik dan pembangunan yang bercirikan sosialis. Kedua model ini yang akan terlihat pada pola pembangunan di Indonesia.

Di sisi lain Sahl M. Katz membagi pembangunan ke dalam dua model yaitu (1) *culture specific*, sebuah konsep pembangunan yang didasarkan pada negara mana yang akan melaksanakannya, dan (2) *time specific*, yang didasarkan pada waktu pelaksanaannya. Sebagai contoh, pembangunan di Indonesia masa Orla berbeda dengan masa Orba. Orla menekankan pada aspek politik dan Orba menekankan pada aspek ekonomi.

Untuk memahami model-model pembangunan yang diterapkan di sebuah negara Martin Stainled, membuat katagorisasi ke dalam empat orientasi, yang selanjutnya menjadi fokus utama ke arah mana pembangunan itu dijalankan oleh negara tersebut. *Pertama, Ortodox Liberalism* adalah bentuk yang diterapkan oleh negara yang sedang melakukan proses pembangunan cenderung pada konsep individualistik. *Kedua, Social Critique of Liberalism* adalah respon dari model yang pertama menekankan pada aspek kepentingan

sosial. *Ketiga, Economism Perspective* yang menganggap kebijakan-kebijakan ekonomi merupakan hal segalanya. Kebijakan-kebijakan non ekonomi ditentukan oleh tindakan-tindakan ekonomi. *Keempat, Politicism Perspective* merupakan kebalikan dari *economism perspective* yang mengang-gap politik sebagai aspek dominan dalam menentukan langkah-langkah ekonomi. Dari orientasi model-model tersebut berimplikasi pada proses tujuan pembangunan yang dicanangkan dalam sebuah negara. Wacana pembangunan menjadi fokus bagi negara-negara dunia ketiga yang mempunyai masalah bagi aspek ekonomi sebagai akibat dari adanya imperialisme dan kolonialisme.

Indonesia merupakan salah satu kasus yang menjadikan wacana pembangunan sebagai alternatif untuk merubah kondisi ekonomi yang mengalami keterpurukan. Para tokoh bangsa berusaha untuk melakukan proses berfikir mengenai konsep pembangunan yang akan diterapkan di Indonesia. Dalam melakukan proses berfikir ini, pemikir Indonesia dipengaruhi oleh sistem ekonomi dunia yang sedang terjadi.

Dalam hal ini Arief mengemukakan bahwa paradigma pembangunan ekonomi Indonesia terkait dengan pengaruh sejarah dunia yang menitikberatkan pada aspek per-tumbuhan dan pembangunan ekonomi berhaluan kapitalistik. Dalam hal ini Rostow mengemukakan bahwa dalam rangka memparameteri kemajuan ekonomi suatu bangsa maka

pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai paradigma pembangunan.

Paradigma pertumbuhan ekonomi terus-menerus dipakai sejak awal-mula pembangunan Orba digaungkan. Asumsinya ialah, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka terjadilah sebuah pemerataan ekonomi, atau apa yang disebut dengan tetesan ke bawah (*trickle down effect*).

Dalam menunjang paradigma di atas, dijadikanlah kapitalisme sebagai paham, dasar, dan filosofi pembangunan. Kapitalisme sebagai sebuah paham ekonomi pada awal perkembangannya berusaha menawarkan bentuk yang akan mengikat semua negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Dengan berbagai alternatif dan ornamennya yang ditawarkan telah membuktikan pada dunia bahwa ia adalah sebuah sistem yang seolah tidak lapuk akan perubahan zaman.

Kapitalisme yang lahir dari sebuah proses panjang yang penuh liku-liku (*trial and error*) mampu menawarkan konsep ekonomi transparan, kompetitif serta berhasil merumuskan mekanisme pasar yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Dalam kondisi inilah Indonesia berusaha menjadikan kapitalisme sebagai landasan dalam proses pembangunan.

Marx mengemukakan bahwa negara terbelakang akan mampu menjadikan dirinya sebagai negara modern apabila bersentuhan dengan negara maju (kapitalis). Meskipun

ungkapan Marx ini banyak kritikan dari pemikir-pemikir lainnya, tetapi pada kondisi tertentu dapat dilihat kebenarannya.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dengan dijadikannya kapitalisme sebagai dasar pertumbuhan ekonomi telah membawa kepada keberhasilan yang cukup lumayan hingga Indonesia sedikit demi sedikit mampu merubah kondisi negara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan yang bersifat fisikpun dalam bentuk aset-aset pem-bangunan yang sangat menakjubkan dapat kita lihat di berbagai penjuru daerah. Hubungan dengan pihak asing terus dilancarkan hingga perkembangan ekonomipun sangat dipenga-ruhinya.

Hingga dewasa ini bangsa Indonesia masih belum mampu meninggalkan bantuan-bantuan dari pihak asing (kapitalis), maka dari itu akhir-akhir ini berbagai upaya dilakukan oleh pihak tertentu (pemerintah), seperti dilakukan oleh presiden untuk bernegosiasi ke berbagai negara di belahan dunia ini tidak lain hanyalah untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing. Konsekuensinya, ketergantungan kepada pihak asing (negara kapitalis) sebagai negara maju sangat tinggi.

Kelompok teori modernisasi diwakili oleh pemikiran Harrod-Domar, McClelland, Max Weber, Rostow, serta Inkeles dan Smith. Ekstraksi dari pemikiran modernisasi tersebut adalah :

- a. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa pembangunan itu sangat "heavy" pada persoalan yang berkaitan dengan penyediaan modal untuk investasi, untuk menggerakkan kegiatan pembangunan. Teori ini sangat percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan "terdongkrak" dengan adanya investasi;
- b. McClelland memperkenalkan teori pembangunan yang menekankan pada aspek psikologi individu. Teori McClelland tentang n-Ach mewakili pendekatan psikologi individu ini. Menurut McClelland kebutuhan / dorongan seseorang untuk berprestasi (**n-ach**) sangat penting untuk membuat suatu pekerjaan berhasil atau tidak. Apakah seseorang itu memiliki semangat untuk berhasil? Ada kepuasan batin sendiri jika pekerjaannya berhasil, keberhasilan material sifatnya sekunder. Dari konsep ini jelas sekali terlihat pengaruh Max Weber di dalamnya. Di sini diketahui bahwa pembangunan itu membentuk manusia berjiwa wiraswasta. Cara membangkitkan dan membentuknya melalui pendidikan individu sejak dini;
- c. Max Weber membangun teori pembangunannya dengan menekankan pada nilai-nilai budaya. Tingkah laku individu salah satunya ditentukan oleh peran agama. Weber meyakini bahwa proses pembangunan di tengah masyarakat akan terlaksana

- jika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (misal dari agama) diarahkan kepada sikap yang positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.;
- d. Teori Rostow dan Hoselitz (teori lepas landas) menekankan pada keyakinan bahwa lembaga-lembaga sosial dan politik penting untuk mendukung proses pembangunan, sebelum proses lepas landas di mulai. Weber menekankan nilai-nilai, sementara Hoselitz menekankan kepada pentingnya lembaga-lembaga yang kongkrit. Lembaga-lembaga sosial dan politik diperlukan untuk menghimpun modal yang besar, memasok tenaga teknis, tenaga teknologi dan tenaga wirausaha. Tesis Rostow adalah bahwa negara-negara tradisional hanya bisa memerdekakan diri karena datangnya faktor-faktor eksternal, dan kalau tidak maka negara-negara miskin akan terus “tidur”, dan tidak dapat bangkit dan maju. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa ada negara-negara terbelakang (negara agraris?);
- e. Menurut teori “kerja” yang dikembangkan oleh Inkeles dan Smith, bahwa perubahan akan dicapai seseorang secara langsung melalui pengalaman kerja. Tingkah laku seseorang atau buruh dapat berubah melalui pengalaman kerja secara nyata. Namun demikian Inkeles dan Smith yakin bahwa untuk membentuk manusia

modern cara pendidikan adalah yang paling efektif.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa dari pendekatan-pendekatan yang muncul dalam studi pembangunan semenjak awal tahun '60-an itu, tampak ada tiga macam asumsi sehubungan dengan posisi negara Dunia Ketiga dalam perkembangan dunia. Asumsi pertama ialah pandangan yang melihat bahwa perubahan terutama harus dan hanya bisa dilakukan dari dalam karena persoalan-persoalan terutama berpangkal dari dalam negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua ialah pandangan yang melihat bahwa perubahan terutama harus dimulai dari kebijakan dari luar karena persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara Dunia Ketiga disebabkan oleh keterkaitannya dengan sistem ekonomi negara-negara bekas penjajah. Asumsi ketiga ialah pandangan yang melihatnya sebagai perubahan dua arah, dari dalam maupun dari luar negara-negara yang bersangkutan, karena persoalan-persoalannya merupakan kombinasi proses-proses yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar.

Pandangan pertama, terutama diwakili oleh pendekatan modernisasi, tetapi juga tercermin dalam pendekatan “pemerataan dengan pertumbuhan” dan “kebutuhan dasar”. Kemampuan suatu negara untuk mencapai kemakmuran yang merata dianggap bisa diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi nasional terlebih dahulu. Melalui nilai tambah

yang kemudian bisa didistribusikan kembali ke masyarakat negara tersebut. Usaha untuk mengatasi persoalan yang muncul (karena dalam perkembangannya ternyata tidak ada pendistribusian kembali ini) lebih dikaitkan dengan Remaun dan kemampuan pemerintah yang bersangkutan untuk melakukannya. Selain itu, menurut pandangan ini, perhatian perlu lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar dari anggota masyarakat yang miskin.

Pembangunan diperlukan untuk mengatasi banyak masalah, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan telah banyak menimbulkan dampak negatif di Indonesia terutama di kota-kota besar telah terjadi pencemaran udara yang disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan yang terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Bank Dunia memperkirakan untuk Jakarta saja pencemaran udara telah menyebabkan kerugian terhadap kesehatan yang tentunya memerlukan biaya. Untuk tahun 1990 saja diperkirakan sebesar US \$ 97 Juta – US \$ 425 juta. Demikian pula pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri semakin banyak terjadi di setiap daerah di Indonesia. Sebagai contoh kerusakan tata guna lahan dan tata guna air di daerah Puncak dan Lembang. Kerusakan tata guna lahan dan tata guna air tersebut menyebabkan laju erosi dan potensi banjir meningkat. Di Jakarta dan

Bandung banjir sudah menjadi peristiwa rutin apabila musim hujan telah tiba. Banjir besar di Jakarta dalam bulan Januari dan Februari 1996 telah menyebabkan kerugian materil yang besar dan banyak menimbulkan penderitaan lain bagi penduduk. (Bruce Rich, 1999; Eko Budihardjo, 1993: Bab IV)

Lingkungan sosial budaya pun merupakan komponen penting yang ikut menentukan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya ialah kesenjangan. Tergusurnya permukiman rakyat kecil oleh pembangunan dan hilangnya hak mengolah atas lahan mereka, sedangkan mereka tidak dapat banyak menikmati hasil pembangunan tersebut, merupakan salah satu sifat penting terjadinya kesenjangan yang makin lebar dan kecukupan sosial yang makin meningkat dalam proses pembangunan.

Kesenjangan yang makin meningkat antara kelompok masyarakat akan menimbulkan kecemburuan dan keresahan sosial sehingga gejolak sosial dengan mudah tersulut bahkan akan meledak. Inilah yang disebut anomie sebagai satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh “keinginan dalam interaksi sosial. *Anomie (gap between goals and means) creates deviance* (Robert K. Merton, 1968: 218-220) Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pembangunan itu harus berwawasan lingkungan. Dengan kata lain pembangunan berwawasan lingkungan adalah syarat yang harus dipenuhi agar

pembangunan dapat berkelanjutan.

Para antropolog belakangan ini telah memadukan wawasan ini dalam analisa mereka terhadap sistem-sistem produksi dan pemaknaan (signifikasi), yakni makna alam dan pemanfaatan alam, menjadi sesuatu yang tak dapat dilepaskan keterjalinannya (Comaroff dan Comaroff 1989); Gudenan dan Rivera 1990; Hvalkof 1989). Para ekologi-politis berusaha menandingi kecenderungan yang produktif ini. Ruang, kemiskinan, dan alam dipandang melalui lensa materialisme berwacana "yang didalamnya, gagasan, wujud, wacana, dan kuasa terjalin sedemikian rupa tak mungkin dipilah-pisahkan" (Yapa 1995: 1). Langkah penting lain ke arah materialisme berwacana ini adalah dengan memaksa diri untuk meninjau cara kebudayaan lokal menangani kondisi-kondisi yang dipaksakan oleh kapital global dan kemodernan (Pred dan Watts 1992).

Terdapat klaim yang belakangan ditemukan dalam ekonomi politik. Yakni pendapat bahwa kapital yang mengalami perubahan bentuk secara mendalam, telah memasuki suatu "tahap ekologis". Di tahap ini, alam tak lagi didefinisikan dan diperlakukan sebagai ranah eksternal yang dapat dieksploitasi. Melalui proses kapitalisasi baru, yang terjadi terutama melalui pergeseran representasi, maka aspek-aspek alam dan masyarakat yang semula "tak terkapitalisasi" kini menjadi unsur internal kapital. "Sejalan dengan kapitalisasi itu, dinamika pokok kapitalisme berubah bentuk, dari akumulasi dan pertumbuhan yang

hidup dari suatu ranah eksternal, menuju manajemen-diri dan konservasi sistem berkenan dengan kapitalisasi alam sebagai sebuah siklus tertutup yang kembali ke diri-sendiri" (M. O'Connor 1993: 8). Transformasi ini agaknya terpapar paling jelas pada diskusi tentang keanekaragaman hutan-hutan tropis. Kunci keberlangsungan hidup hutan-hutan tropis dipandang terletak pada gen-gen galur biologis, yang kemanfaatannya dapat diwujudkan jadi laba melalui rekayasa genetik dan bio-teknologi dalam produksi benda-benda bernilai komersial, semacam produk farmasi. Dengan demikian, kapital mengembangkan kecenderungan pelestari alam, sangat berbeda dari bentuk lazimnya yang serampangan dan merusak. (Philip Quarles van Ufford, dalam R.G. Sukadijo, 1989: 152-167)

Sebagai sebuah kerangka teoritik, ekologi politik ini dapat memahami dan memenuhi syarat-syarat dialektika antara alam dan kapital secara bermakna. Argumen yang lebih tua menyatakan bahwa restrukturisasi kapitalis telah terjadi atas biaya kondisi produksi: alam, tubuh manusia, dan ruang. Didorong oleh persaingan dan pengalihan biaya antara berbagai kapital/kapitalis, maka restrukturisasi kapitalis menandai makin mendalamnya pencaplokan kapital terhadap alam dan buruh, makin menjadi-jadinya krisis ekologis, serta pengeroposan produksi sang kapital yang disebut James O'Connor

(1988,1989) sebagai “kontradiksi kedua” kapitalisme.

Dengan pendekatan teori ekologi politik ini analisa dampak memudahkan untuk melihat strategi pembangunan berkelanjutan dan cara utama untuk membawa alam ke dalam wacana, di tempat-tempat yang masih dikenal sebagai Dunia Ketiga. Penciptaan kembali alam secara terus menerus memerlukan bukan saja dibawa-bawa alam ke ranah wacana-wacana baru melainkan juga dibawanya alam ke dalam kapital dengan cara-cara baru.

PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Sepintas lalu antara pembangunan dan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik). Apabila dilihat dari segi luas setiap pembangunan selalu memberikan dampak pada lingkungan hidup, misalnya pembukaan sebuah jalan raya yang menghubungkan suatu wilayah dengan yang lainnya tentu akan membawa dampak pada lingkungan hidup sekitarnya. Katakanlah dengan pembukaan jalan tersebut akan membawa pengaruh pada dua hal, yaitu (1) penebangan pohon yang terkena peta pembukaan jalan, dan (2) terganggunya kestabilan kondisi tanah di sekitarnya.

Sungguhpun demikian, pengaruh dua hal ini tidak begitu merugikan apabila dibandingkan dengan manfaat selanjutnya yang akan diperoleh pada sub-subsistem lingkungan sekitarnya, bahkan akan memberikan keserasian

yang lebih baik. Pengaruh positif dari hasil pembuatan jalan tersebut yakni pada pembukaan jalan itu, misalnya menambah mata pencaharian penduduk dan terutama meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber daya lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya walaupun timbul eksekusi lain secara ekologis dari proyek tersebut, eksekusi tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. (Otto Soemarwoto, 1991: 23-57)

Melalui contoh di atas, tergambar bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup sesungguhnya tidaklah bertentangan. Yang menimbulkan pertentangan adalah kalau ternyata setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pengorbanan-pengorbanan secara ekologis. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih besar antara dua kepentingan di atas, maka UKPPLH 1982 menggariskan prinsip yaitu pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam pasal 1 butir ke-13, dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Jadi, ada tiga unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yaitu: (1) Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana, (2) Menunjang pembangunan yang

berkesinambungan, dan (3) Meningkatkan mutu hidup. (Otto Soemarwoto, 1997)

Faktor lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan ialah: (1) Terpeliharanya proses ekologi yang esensial, (2) Tersedianya sumber daya yang cukup, (3) Lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai. (Kusnaka Adimihardja, 1993).

Terpeliharanya proses ekologi yang esensial; di alam terdapat proses ekologi yang menjadi penopang kehidupan manusia. Rusaknya proses ekologi itu akan membahayakan kehidupan di bumi. Energi untuk proses ekologi itu didapatkan dari matahari. Tersedianya sumber daya yang cukup; pembangunan merupakan usaha untuk menaikkan manfaat yang didapat dari segala sumberdaya. Kenaikan manfaat itu didapat dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tanpa meningkatkan jumlah sumber daya yang dipakai. Dengan usaha ini akan diperoleh hasil yang lebih besar dengan sejumlah sumber daya yang sama ke dalam usaha meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk pula daur ulang. Usaha meningkatkan efisiensi sangat penting dengan makin langkanya persediaan sumber daya relatif terhadap kebutuhan. Kenaikan kebutuhan itu disebabkan baik oleh peningkatan jumlah penduduk maupun peningkatan permintaan perorangan.

Usaha meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya tidak saja

penting untuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui melainkan juga untuk yang dapat diperbarui. Usaha itu penting dari dua segi. Pertama, untuk sumber daya yang dapat diperbarui kenaikan intensitas eksploitasi akan mempertinggi resiko terhadap kerusakan sumber daya. Kerusakan itu dapat membuat sumber daya itu menjadi tidak dapat diperbarui, kecuali dengan biaya yang tinggi seperti telah diuraikan di atas. Untuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui, kenaikan intensitas eksploitasi akan mempercepat penyusutan sumber daya. Artinya, sumber daya itu akan makin berkurang dan habis. Kedua, penggunaan sumber daya dalam jumlah yang makin besar pada umumnya akan memperbesar masalah pencemaran. Ketiga, Mencari sumber daya alternatif. Sumber daya yang paling utama ialah pada manusia, pada akhirnya manusialah yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan. (Bdk. Wisma Arya Wardhana, 1995)

Lingkungan sosial budaya dan ekonomi sangatlah penting bagi kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan, sebab pembangunan dilakukan oleh dan untuk manusia yang hidup di dalam kondisi sosial budaya dan ekonomi tertentu. "Pembangunan berkelanjutan" digunakan untuk mengartikan perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya. "Ekonomi berkelanjutan" adalah buah dari pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi yang demikian tetap memelihara basis sumber daya alam yang digunakan. Tata ekonomi seperti ini dapat terus berkembang dengan penyesuaian-penyesuaian, dan dengan menyempurnakan pengetahuan, organisasi, efisiensi teknik, serta kebijakan. (J.B. Banawiratma, 1996: 43)

“Masyarakat berkelanjutan” adalah masyarakat yang hidup dengan sembilan prinsip, sebagai berikut:

- (1) Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.
- (2) Memperbaiki kualitas hidup manusia.
- (3) Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi.
- (4) Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang baru.
- (5) Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.
- (6) Mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang.
- (7) Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
- (8) Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian.
- (9) Menciptakan kerja sama global.

Pada umumnya faktor ekonomi mendapat perhatian yang seperlunya karena semua orang menyadari bahwa pembangunan tidak akan dapat dilanjutkan apabila ekonomi tidak menunjangnya. Akan tetapi faktor sosial budaya sering diabaikan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa faktor sosial budaya telah

menyebabkan tak terlanjutkannya pembangunan di banyak negara, misalnya hancurnya Syah Iran dan ambruknya Uni Soviet.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Misalnya semburan asap beracun dari kawah sivilia di Dieng adalah aktivitas alam yang bersifat kimia, gempa bumi adalah aktivitas alam fisik dan pertumbuhan masalah eceng gondok adalah aktivitas alam biologi. Aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia misalnya pembangunan sebuah pelabuhan dan penyemprotan dengan pestisida. Dalam konteks analisa dampak lingkungan (ANDAL), penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan. Dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan. Dampak pembangunan selain terhadap lingkungan fisik (alam) juga bersifat sosial ekonomi dan budaya. Misalnya, dampak pembangunan industri baja terhadap perubahan nilai sosial budaya masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang tadinya sebelum ada pabrik menganut nilai budaya agraris sehingga dapat berubah menjadi masyarakat yang menganut nilai budaya masyarakat industri.

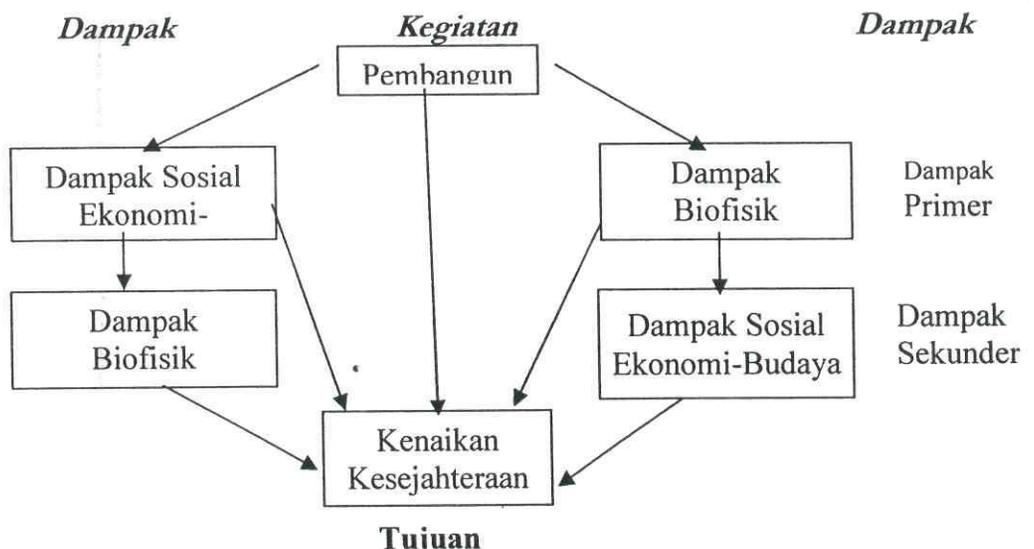
Sasaran pembangunan ialah untuk menaikkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan itu dapat mengakibatkan dampak primer biofisik atau sosial ekonomi budaya. Dampak primer ini akan mempengaruhi sasaran kesejahteraan yang ingin dicapai. Dapat juga terjadi dampak perimer itu menimbulkan dampak sekunder, tersier, dan seterusnya, yang masing-masing dapat bersifat biofisik atau sosial ekonomi budaya. Dampak sekunder, tersier, dan sterusnya itu juga akan mempengaruhi sasaran yang ingin dicapai (Rozy Munir, at.al., 1987: 148-188)

Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan perbandingan sebagai acuan. Salah satu acuan adalah keadaan sebelum terjadi perubahan. Misalnya, apabila dikatakan dampak pembangunan industri baja terhadap perilaku masyarakat, maka kita harus memiliki data menilai

budaya masyarakat sebelum adanya industri baja dan sesudah adanya industri baja. Di dalam ANDAL dijumpai dua jenis batasan tentang dampak yaitu:

- a) Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan.
- b) Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan; dan diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut. (Rozy Munir, ibid.: 222-227) . Berikut contoh dampak pembangunan terhadap lingkungan



(Adaptasi dari Rozy Munir, Ibid.: 104)

Pembangunan mempunyai sasaran menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat. Aktivitas pembangunan itu menimbulkan efek yang tidak direncanakan di luar sasaran, yaitu yang disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik dan sosial ekonomi budaya yang mempunyai pengaruh terhadap terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dampak primer dapat menimbulkan dampak sekunder, tersier, dan seterusnya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. (Mangatas Tampubolon. 2004:1).

United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

- (1) Getting to know the local community
Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- (2) Gathering knowledge about the local community
Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- (3) Identifying the local leaders
Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor “the local leaders” harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- (4) Stimulating the community to realize that it has problems

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

- (5) Helping people to discuss their problem
Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- (6) Helping people to identify their most pressing problems
Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- (7) Fostering self-confidence
Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- (8) Deciding on a program action
Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang,

dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

- (9) Recognition of strengths and resources
Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- (10) Helping people to continue to work on solving their problems
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- (11) Increasing people's ability for self-help
Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.
Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya - self help - masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan

swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat. (Mangatas Tampubolon. 2004:12)

Mangatas Tampubolon (2004:13) mengemukakan bahwa membangun masyarakat dari wacana berpikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional adalah aktivitas pendidikan. Bahkan keseluruhan proses kegiatan pembangunan masyarakat desa/kota - *rural and urban community development*- itu memerlukan "*community education*". Bentuknya bervariasi, mulai pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, demokrasi, pendidikan keterampilan, dan lain-lain. Pada umumnya segala kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha pendidikan nonformal yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan "kualitas hidup" masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah adanya perubahan perilaku - behavior - . Komponen-komponen perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh warga

belajar/peserta didik (*knowledge*), apa yang dapat mereka lakukan (*skills*), apa yang mereka pikirkan (*attitudes*) dan secara nyata apa yang mereka kerjakan (*action*). Secara sederhana, perilaku terdiri dari 3 domain atau kawasan yaitu domain perilaku pengetahuan - *knowing behavior* -, domain perilaku sikap -*feeling behavior*- dan domain perilaku keterampilan -*doing behavior*-. Apabila lebih disederhanakan maka, perilaku terdiri dari 2 unsur yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan Intelektual - KI - (masyarakat Barat yang rasional dan individualistis) cenderung mendengarkan "Kata Kepala" sedangkan Kecerdasan Emosional - KE -, termasuk budi pekerti (masyarakat Timur yang masih terikat pada tradisi) mendengarkan "Kata Hati". Hasil penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam berprestasi ditentukan oleh hanya 20 persen dari KI-nya sedangkan 80 persen oleh faktor lain, terutama KE-nya.

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Bantuan "*technical assistance*" jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu

membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu “*Right of Self-Determination dan Right for Equal Opportunity*”. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

Idea dari pembangunan/pemberdayaan masyarakat adalah “*Accept the community as they are*” and “*Begin the community development work, where the community is*” (Burton E. Swanson 1988:25). Dengan demikian, pola pemberdayaan masyarakat apapun yang kita pilih, maka pola tersebut harus bebas dari perlakuan-perlakuan diskriminasi, prejudice, dan subjektif terhadap masyarakat. Masyarakat harus diterima sebagaimana mereka adanya tanpa membandingkan dengan masyarakat lain, dan kegiatan pembangunan masyarakat harus dimulai dari dimana masyarakat berada. Artinya rencana pembanguan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, dan kebutuhan mana yang menjadi prioritas dipenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Ross, (1987 : 77-78) mengemukakan tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

- (1) *The “single function” approach in which programmes or techniques are implanted by external agents -“a new school, a medical program, or a housing project, which the external agent (or the organization he presents) thinks will benefit the community.*
- (2) *The “multiple” approach in which there is recognition of the wholeness of community life and a team of experts seeks to provide a variety of services and to solve some of the problems which may arise as alterations are made in the community.*
- (3) *The “inner resources approach”. “Here stress is laid on the need to encourage communities of people to identify their own wants and needs and to work co-operatively with governmental and other agencies at satifying them.*

Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat “*The single function*” adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang. Demikian juga dengan pola pendekatan “*The multiple approach,*” dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena

segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

Pola pendekatan yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat ialah "*The inner resources approach*". Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi "*concern*" akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Arthur Dunham (1958) seorang pakar dalam Pembangunan Masyarakat mengemukakan bahwa "Pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan *memberdayakan masyarakat* untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela" Pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi,

sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta *memberdayakan* mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Dari definisi Pembangunan Masyarakat tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- (1) Pembangunan Masyarakat merupakan suatu proses yang terorganisir ; dalam arti berkesinambungan; tahap demi tahap; dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi.
- (2) Pembangunan Masyarakat bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- (3) Pembangunan Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip "*to help the community to help themselves*"; dengan demikian kegiatan-kegiatannya dilakukan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri.
- (4) Pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan penekanan pada prinsip kemandirian; dengan demikian masyarakat harus partisipasi secara aktif sejak menentukan masalah hingga upaya pemecahannya. Metode yang digunakan adalah "*doing with the community*" bukan "*doing for the*

community". Dengan metode ini masyarakat menjadi aktif dan dinamis dari mengidentifikasi masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhannya serta menentukan pemecahannya dengan menggali sistem sumber yang ada dilingkungannya sendiri.

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan) (Oxford English Dictionary). Secara tersirat, makna tersebut menyatakan bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industri yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan Tiga-P; Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan

Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. (Vitayala, 2000). Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mencakup :

- (1) Pengembangan kelembagaan dari tingkat pusat hingga pedesaan.
- (2) Pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, sarana dan prasarana.
- (3) Pengembangan pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat; penyuluhan dan pelayanan.

KESIMPULAN

Segala upaya pembangunan berwawasan lingkungan, memerlukan manajemen modern agar proses pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan hingga berhasil antara lain sebagai berikut :

- (1) Upaya pemahaman terhadap karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya; berupa informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal agar mendapat dukungan dari tokoh masyarakat setempat.

- (2) Penysadaran masalah; yaitu pendekatan persuasif terhadap masyarakat agar sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- (3) Membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahannya dan memenuhi kebutuhannya.
- (4) Masyarakat didorong untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- (5) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

Menjadikan masyarakat mampu untuk memahami permasalahan, merumuskan program dan menentukan strategi; dalam arti merubah pola pikir dan perilaku masyarakat adalah suatu proses pendidikan. Baik pendidikan formal,

nonformal, penyuluhan maupun latihan-latihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo : Pondok Edukasi.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: LP.FE-UI
- Bratakusumah.D.S. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Bryan, Coralie. and G.L. White. 1997. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Clark, John. 1991. *Democratizing Development : The Role of Voluntary Organizations*. Connecticut : Kumarian Press, Inc.
- Cribbin, James J. 1985. *Kepemimpinan "Strategi Mengefektifkan Organisasi"*, Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Gaffar, Affan. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Garna, Judistira, K. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung : Program Pascasarjana

- Universitas Padjadjaran.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Haji Mas Agung
- Hersey, Paul dan Ken Blanchard, 1995, *Manajemen Perilaku Organisasi (Alib Babasa : Agus Dharma, Ph.D)*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmat, Harry, 2006. *Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, Jakarta : CV. Cipruy
- Indrawijaya, Adam. 1986. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Iskandar, Jusman. 2004. *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty.
- Koontz, Harold., Cyrill O'Donnel & Weinich. 1987. *Management*, Ninth edition, McGraw-Hill.
- Mar'at, 1985, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mubyarto, 1987. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty dan P3PK UGM.
- Pasaribu, I.L dan B.Simanjuntak. 1986. *Pendidikan Dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : Tarsito.
- Siagian, Sondang, P. 1989. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : LP3ES.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka ---Jaya.
- Sumarto, Hetifah, Si. 2004. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 1996, *Perilaku Organisasi* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Sunyoto, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar